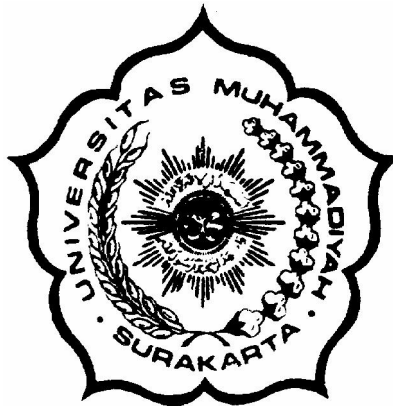


NASKAH PUBLIKASI

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG
MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU-LINTAS DAN MATINYA
ORANG LAIN YANG DILAKUKAN PENGEMUDI
KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)**



Oleh:

FAJAR SANTOSO
C 100 080 096

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2012

PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan dihadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



Dr. Natangsa Surbakti, SH., M.Hum.

Pembimbing II

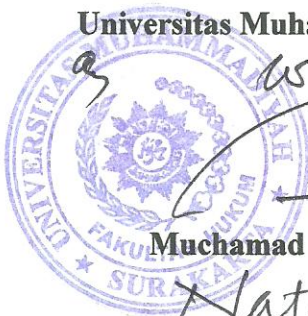


Muchamad Iksan, SH., M.H.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Wasalut Dekan?

Muchamad Iksan, SH., M.H.

Natangsa Surbakti

ABSTRAK

Fajar Santoso, C 100080096. PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU-LINTAS DAN MATINYA ORANG LAIN YANG DILAKUKAN PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kealpaan pada kecelakaan lalu-lintas dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap perkara tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain yang dilakukan pengemudi sepeda motor di Pengadilan Negeri Surakarta. Pendekatan penelitian hukum ini, menggunakan pendekatan hukum normatif atau doktrinal yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif. Jadi di sini penulis berusaha melukiskan keadaan dari suatu objek yang dijadikan permasalahan yaitu mengenai pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain tersebut. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta. Sumber data yang dipergunakan pada dasarnya hanya mendasarkan data-data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, KUHP, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, buku-buku referensi, dll,. Data yang diperoleh akan diolah kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kecelakaan lalu-lintas dan matinya orang lain yang dilakukan pengemudi kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Surakarta telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, Norma, Doktrin dan Yurisprudensi yang telah ada.

Kata kunci: Kealpaan, kecelakaan, lalu-lintas.

ABSTRACT

Fajar Santoso, C 100 080 096. COMPLETION OF THE CRIME OF SEVERE omission traffic accident and the death OTHERS DO DRIVERS OF MOTOR VEHICLE (Case Studies in the District Court of Surakarta)

Other research aims to determine the cause Fator occurrence of negligence in traffic accidents and the consideration of judges in the criminal verdict of criminal negligence case which led to the death of another person who performed the motorcyclist in the District Court of Surakarta. Approach to legal research, the use of normative legal or doctrinal approach to legal research is done by examining library materials or secondary data alone. In the preparation of this thesis, the author uses a descriptive study. So here the author tried to portray the state of an object that made the issue of consideration in the hearing and the judge decided the case of criminal negligence causing the death of another person. Research sites in the District Court of Surakarta. Source of data used is basically just a secondary data base that includes primary legal materials and secondary legal materials such as: Decision of the District Court of Surakarta, Penal Code, Law No. 22 of 2009, reference books, etc.,. The data obtained will be processed and analyzed qualitatively. The results showed that the process of resolving criminal negligence causing traffic accidents and death of other people who do motorists in the District Court of Surakarta in accordance with the provisions of the Act, Norma, doctrine and jurisprudence that have been there.

Key words: negligence, accident doll, traffic.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala hak warga yang sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Agar hukum di negara kita dapat berkembang dan kita bisa berhubungan dengan bangsa lain di dunia sebagai sesama masyarakat hukum, kita perlu memelihara dan mengembangkan asas-asas dan konsep-konsep hukum yang secara umum dianut umat manusia atau asas hukum yang universal.¹ Salah satu asas pembangunan nasional didasarkan pada penghayatan pembinaan sikap penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana yaitu untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan.²

Dari perkembangan lalu-lintas saat ini, dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai masih banyak pengemudi yang belum siap mental. Dalam arti para pengemudi kurang perhitungan, karena sikap dan perilaku seorang pengendara bermotor di jalan raya sangat menentukan keselamatan baik

¹ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, Hal.183-184.

² Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 4.

dirinya maupun orang lain. Lunturnya sikap tertib terhadap aturan lalu-lintas serta dorongan berperilaku tak terpuji selama dalam mengendarai kendaraan bermotor, seperti: tidak mengindahkan tanda-tanda jalan atau kurang mengerti dan tidak mengenal rambu-rambu atau isyarat lalu-lintas, selain itu kurangnya memperhatikan petunjuk-petunjuk yang telah ada di jalan-jalan raya.

Kecelakaan lalu-lintas kebanyakan disebabkan oleh meningkatnya frekuensi pemakai jalan. Peningkatan itu terjadi karena banyak jumlah kendaraan bermotor yang menggunakan jasa perhubungan, sedangkan pertumbuhan prasarana fisik yaitu jalan umum tidak sebanding dengan jumlah kendaraan. Mutu dan lebar jalan masih tergolong belum memenuhi standar yang dikehendaki. Tetapi yang jelas setiap kecelakaan lalu-lintas mendatangkan kerugian yang tidak sedikit.

PERUMUSAN DAN PEMBATASAN

Penelitian ini hanya difokuskan pada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tentang tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kecelakaan lalu-lintas dan matinya orang lain yang dilakukan pengemudi kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kealpaan pada kecelakaan lalu-lintas? (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap perkara tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain yang dilakukan pengemudi kendaraan bermotor?

TUJUAN DAN MANFAAT

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: (1) Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kealpaan pada kecelakaan lalu-lintas. (2) Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap perkara tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain yang dilakukan pengemudi kendaraan bermotor.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: (1) Manfaat Teoritis: Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum terutama yang berhubungan dengan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain yang dilakukan pengemudi kendaraan bermotor. (3) Manfaat Praktis: Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti.

KERANGKA PEMIKIRAN

Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, tetapi terhadap sebagian dari padanya ditentukan bahwa di samping kesengajaan itu orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP dapat dipidanya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.³ Tetapi dalam kasus kealpaan dalam kecelakaan lalu-lalu lintas yang menyebabkan matinya orang

³ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta ; PT Rineka Cipta, hal:198.

lain diatur sendiri dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yang merupakan *lex specialis* dari Pasal 359 tersebut.

Dengan mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu bentuk kesalahan, maka dikatakan pula bahwa sikap batin yang demikian itu adalah berwarna. Artinya selalu kita hubungkan dengan sikap batin terhadap perbuatan yang dipandang dari sudut hukum adalah keliru. Sama saja dengan kesengajaan, bahkan lebih dari itu, lebih berwarna daripada kesengajaan, kalau masih mungkin mengatakan “dengan sengaja berbuat baik” atau “dengan sengaja berbuat jahat”, pada hemat saya tidaklah mungkin mengatakan “karena kealpaanya berbuat baik”. Sebab tidaklah mungkin menyatakan demikian ialah karena istilah kealpaan itu sendiri terkandung makna kekeliruan.⁴

Van Hamel mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat:⁵

(1) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Mengenai hal ini ada dua kemungkinan, yaitu: (a) Terdakwa berfikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata tidak benar. Dalam hal ini kekeliruan terletak pada salah pikir atau pandang, yang seharusnya disinghiri. Ini merupakan kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*). (b) Terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Dalam hal ini terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat yang mungkin akan timbul, hal mana adalah sikap yang berbahaya.. Dikatakan bahwa dalam hal ini adalah kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*).

⁴ *Ibid*, hal. 200.

⁵ *Ibid*, hal. 201.

(2) Tidak mengadakan penghati-hati yang diharuskan oleh hukum. Ini antara lain ialah tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegahan yang ternyata dalam keadaan-keadaan yang tertentu atau caranya yang melakukan perbuatan.

Untuk menetapkan adanya kesengajaan dan kealpaan adalah sangat sulit, sehingga dalam praktik peradilan digunakan sistem *objectieve culpa*, atau kelalaian yang diobjektifkan. Cara yang digunakan ialah dengan menganalisis perbuatan yang berbahaya yang dilakukan oleh terdakwa (yang lazimnya menyangkal) dengan perbuatan berbahayanya itu mempunyai kealpaan atau kelalaian. Yang paling mudah ialah penentuannya jikalau dihadapi perbuatan fungsional, misalnya pengemudi mobil yang pekerjaannya memang menjalankan mobil.⁶

Kealpaan yang terjadi terutama pada kecelakaan lalu lintas seringkali memakan korban, akan tetapi pelaku sering mendapatkan hukuman yang ringan yaitu hanya beberapa bulan saja padahal korbanya menjadi cacat seumur hidup bahkan meninggal dunia. Se jauh mana pertanggungjawaban pelaku pelanggaran yang sering terjadi mempunyai banyak pertanyaan besar terutama bagi masyarakat yang kurang mengerti hukum. Dalam hal kealpaan ini, mempunyai kriteria kealpaan yang bisa dirumuskan yaitu: apabila seseorang melakukan perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang, dimana perbuatan tersebut berakibat kurang hati-hati atau lalai atau kurang waspada.

⁶ Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 333.

Dalam proses peradilan tentang tindak pidana kealpaan sama dengan tindak pidana lainnya, diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang di dalamnya memberikan perlindungan hukum bagi tersangka dan tidak adanya diskriminasi terhadapnya, karena berlakunya asas "praduga tak bersalah" dimana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan hakim dari pengadilan menyatakan kesalahannya yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Mengenai pertanggungjawaban pidana menggunakan prinsip "tiada pidana tanpa kesalahan". Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan sebagai ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Apakah pembuat yang telah melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) kemudian dapat dijatuhi pidana, sangat tergantung pada persoalan apakah dalam melakukan tindak pidana, sipembuat dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain apakah pembuat mempunyai kesalahan.⁷

Dalam hal ini yang dipertimbangkan oleh hakim bukan caranya orang berbuat, akan tetapi kealpaan atau kelalaiannya yang menyebabkan akibat itu. Jadi termasuk apa yang disebut delik materiil, yaitu bahwa tindak pidana itu baru lengkap apabila terjadi akibatnya. Yang merupakan materinya adalah

⁷ Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal. 193.

kematian orang atau orang mendapat luka berat, yang menyebabkan ia menjadi sakit atau tidak dapat bekerja lagi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian hukum ini, menggunakan pendekatan hukum normatif atau doktrinal yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁸ Penelitian ini berdasarkan pada penelitian yang bersifat deskriptif.⁹ Jadi di sini penulis berusaha melukiskan keadaan dari suatu objek yang dijadikan permasalahan. Kemudian Data yang diperoleh akan diolah kemudian dianalisis secara kualitatif.¹⁰

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kealpaan Pada Kecelakaan Lalu-Lintas

Dalam literatur disebutkan bahwa kecelakaan lalu-lintas disebabkan oleh beberapa 4 faktor yang saling berkaitan, yakni:¹¹ (1)) Faktor manusia, yaitu kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian pengendara itu sendiri. Faktor manusia juga merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif (Secara Singkat)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal. 15

⁹ Amiruddin & Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 25.

¹⁰ M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 133.

¹¹ Kosasih, *Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas*, <http://siwasciamis.blogspot.com/2012/02/faktor-penyebab-kecelakaan-lalu-lintas.html>, Diunduh pada tanggal, 1 Mei 2012.

terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pula pura-pura tidak tahu. (2) Faktor kendaraan, faktor juga menyumbang cukup besar terhadap penyebab kecelakaan lalu-lintas. Faktor Kendaraan merupakan kecelakaan yang diakibatkan karena tidak terkendalinya kendaraan disebabkan oleh gangguan teknis. (3) Faktor jalan, yaitu terkait dengan kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya median jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak/berlubang sangat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pemakai sepeda motor. (4) Faktor Cuaca, hari hujan juga memengaruhi unjuk kerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan menjadi lebih licin, jarak pandang juga terpengaruh karena penghapus kaca tidak bisa bekerja secara sempurna atau lebatnya hujan mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek..

Dari ketiga kasus yang menjadi objek kajian penelitian ini, faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu-lintas yang menyebabkan matinya orang lain adalah faktor manusia.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap perkara tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kecelakaan lalu-lintas dan matinya orang lain yang dilakukan pengemudi kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Surakarta

Dalam putusan hakim, majelis hakim harus memberikan pertimbangan pertimbangan sebelum memutus suatu perkara, begitu pula putusan hakim tentang tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain yang dilakukan pengemudi kendaraan bermotor, hakim harus mempertimbangkan keterangan saksi, pembelaan terdakwa, jaksa penuntut umum, dan alat bukti.

Dalam pertimbangan hakim mengenai perkara pidana kealpaan pengemudi yang menyebabkan matinya orang lain dari beberapa Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, hakim menjatuhkan putusan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan.

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan pemeriksaan barang bukti maka telah ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa kasus I Stefanus Haryanto Bin Hadi Karto, terdakwa kasus II Mulyono Bin Marto Sentono, terdakwa kasus III Warsito Bin Paimin telah terbukti melakukan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain. Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Untuk membuktikan seseorang dapat dipidana, maka harus diketahui unsur-unsur tindak pidana tersebut. Adapun kualifikasi unsur-unsur tindak pidana Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Unsur barang siapa

Pertimbangan Hakim terhadap unsur “barangsiapa” menyatakan bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dimaksudkan manusia (subjek hukum) selaku pendukung hak dan kewajiban barang siapa di sini dimaksudkan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Dalam hal ini terdakwa telah dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum, yang atas pertanyaan Hakim Ketua bahwa identitas para terdakwa tersebut sama dengan identitas yang tersebut dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) yang dihadapkan para terdakwa.

Dalam proses persidangan, menurut pengamatan Majelis, terdakwa dalam keadaan sehat jiwanya, dan tidak dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka menurut hukum terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab, dari pertimbangan tersebut, menurut Majelis unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum.

Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas

Pertimbangan Hakim terhadap unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas” bahwa yang dimaksud unsur “kelalaian” adalah suatu keadaan kurang hati-hatian subjek hukum atau dalam diri subjek hukum tidak ada sikap penghati-hati. Dalam Ilmu Hukum Pidana, kelalaian mempunyai corak kesalahan sebagai *culpa* artinya pelaku atau terdakwa tidak menghendaki adanya delik yang dimaksud *in casa* Terdakwa terdakwa tidak menghendaki kecelakaan tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dengan demikian “unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas ini” telah terpenuhi.

Unsur dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Pertimbangan Hakim terhadap unsur “dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia” menyatakan bahwa arti kata “mati” dalam unsur pasal ini tidak dimaksudkan atau tidak diniatkan sama sekali oleh terdakwa, melainkan kematian orang lain *in casa* Korban meninggal hanya merupakan akibat yang timbul dari kelalaian atau kurang hati-hatian atau tidak adanya sikap penghati-hati dalam diri terdakwa.

Menurut Majelis Hakim, kelalaian atau kurang hati-hatian atau tidak adanya sikap penghati-hatian dalam diri terdakwa merupakan syarat mutlak (*quad non*) bagi “matinya orang lain”. Dengan demikian “unsur ini” telah terpenuhi menurut hukum.

Unsur-Unsur Tindak Pidana dihubungkan dengan Norma, doktrin, dan Jurisprudensi

Unsur barang siapa

Doktrin: “Subjek tindak pidana adalah sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau dikenai sanksi pidana. Jadi subjek tindak pidana merupakan pelaku tindak pidana yang berdasarkan undang-undang dapat bertanggungjawab dan dikenai pidana. Subjek tindak pidana meliputi orang (manusia alamiah), dan korporasi (persyarikatan) baik yang berstatus badan hukum maupun bukan badan hukum. Berdasarkan rumusan redaksi tindak pidana di dalam KUHP, yang lazimnya menggunakan kata “*barangsiapa*” untuk menunjukkan subjek, pada umumnya dianggap merujuk pada pengertian manusia atau orang.¹²”

¹² Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal 139.

Norma: Pasal 44 KUHP ayat (1) “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelijke storing), tidak dipidana.”

Berdasarkan analisis di atas, yakni adanya relevansi baik antara pertimbangan hakim dengan Dakwaan JPU dan Pembelaan terdakwa serta hubungan antara pertimbangan hakim dengan alat bukti yang diajukan oleh JPU dan Pembelaan terdakwa, dibandingkan dengan doktrin atau pendapat ahli yang berkaitan dengan unsur “barangsiapa”, bisa dikatakan telah sesuai. Sebab, sebagaimana doktrin yang telah ada dimana kata “barangsiapa” dapat diartikan subjek tindak pidana yang merupakan pelaku tindak pidana yang berdasarkan undang-undang dapat bertanggungjawab dan dikenai pidana. Subjek tindak pidana meliputi orang (manusia alamiah), dan korporasi (persyarikatan) baik yang berstatus badan hukum maupun bukan badan hukum, pelaku tindak pidananya adalah terdakwa.

Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu-lintas”

Doktrin: Van Hamel mengatakan bahwa kealpaan/kelalaian itu mengandung dua syarat:¹³ (1) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum (2) tidak mengadakan penghati-hati yang diharuskan oleh hukum. Ini antara lain ialah tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegahan yang ternyata dalam keadaan-keadaan yang tertentu atau caranya yang melakukan perbuatan.

¹³ Moeljatno, *Op.Cit*, hal. 201

Yurisprudensi: “seorang pengemudi mobil, sedang ia tidak dapat memperhitungkan akibat yang timbul karena telah minum alkohol terlalu banyak sehingga berbuat ceroboh dan tidak hati-hati. Ia dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat yang timbul dari perbuatannya”. (Hoad Raad, tanggal 3 Januari 1934).¹⁴

Berdasarkan analisis di atas, yakni ada relevansi baik antara pertimbangan hakim dengan Dakwaan JPU dan Pembelaan terdakwa serta hubungan antara pertimbangan hakim dengan alat bukti yang diajukan oleh JPU dan Pembelaan terdakwa, dibandingkan dengan doktrin atau pendapat ahli dan yurisprudensi yang berkaitan dengan unsur “kelalaian/kealpaan”, bisa dikatakan telah sesuai. Sebab, Terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Dalam hal ini yang dipertimbangkan oleh hakim bukan caranya orang berbuat, akan tetapi kealpaan atau kelalaiannya yang menyebabkan kecelakaan itu.

Unsur “Dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Doktrin: “Dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia” misalnya: menabrak anak yang sedang menyeberang jalan hingga meninggal dunia oleh pengemudi mobil.¹⁵ Ini adalah contoh kealpaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Berdasarkan analisis di atas, yakni adanya relevansi baik antara pertimbangan hakim dengan Dakwaan JPU dan Pembelaan terdakwa serta

¹⁴ Leden Marpaung, Op.Cit, Hal. 29

¹⁵ J.E.Sahetapy, 1995, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, Hal.109

hubungan antara pertimbangan hakim dengan alat bukti yang diajukan oleh JPU dan Pembelaan terdakwa, dibandingkan dengan doktrin atau pendapat ahli yang berkaitan dengan unsur “Dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, bisa dikatakan telah sesuai. Sebab, sebagaimana doktrin yang telah ada yakni dari J.E.Sahetapy misalnya: menabrak anak yang sedang menyeberang jalan hingga meninggal dunia oleh pengemudi mobil, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan matinya orang lain.

PENUTUP

Tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang tidak disengaja yang menyebabkan orang lain-lain luka-luka bahkan meninggal dunia dan tindak pidana ini terjadi secara tiba-tiba tanpa direncanakan sebelumnya.

Kecelakaan lalu-lintas adalah kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor bertabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia atau binatang. Kecelakaan lalu-lintas disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: Faktor manusia, Faktor kendaraan, Faktor jalan, dan Faktor Cuaca. Dalam 3 (tiga) kasus yang menjadi objek kajian ini, semua kecelakaan disebabkan oleh faktor kelalaian manusia sendiri.

Dasar pertimbangan yang digunakan Hakim di dalam pemeriksaan perkara tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan matinya orang lain ada 2 yaitu pertimbangan yuridis yaitu Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 359 KUHP serta pertimbangan non

yuridis yang memberatkan dan meringankan meliputi selama pemeriksaan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa, terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya; terdakwa belum pernah dihukum; dan terdakwa mengakui perbuatannya. Adapun pertimbangan hakim dalam kasus ini berdasarkan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum, tanggapan terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi, barang bukti perkara yang dihadirkan di dalam persidangan, kesinambungan / kesesuaian dan hubungan antara fakta-fakta hukum dan keterangan antar saksi, hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari si terdakwa, dan keterangan terdakwa tentang kebenaran tindak pidana yang dilakukan.

SARAN

Bagi Bagi Aparat penegak hukum terutama Hakim dalam menjatuhkan pidana tentunya sudah memiliki pertimbangan-pertimbangan sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun alangkah lebih baiknya dalam mempertimbangan sesuatu sebelum menjatuhkan putusan perlu juga memperhatikan faktor tanggungan keluarga, jika si pelaku menjadi tulang punggung keluarga maka putusan pidananya harap diringankan.

Bagi masyarakat yang mengetahui kejadian kecelakaan lalu-lintas harap pelaku diserahkan kepada pihak yang berwajib dan jangan main hakim sendiri, apabila korban mengalami luka-luka harap segera dibawa ke Rumah Sakit.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin & Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Farid, Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika,

Kosasih, *Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas*, <http://siwasciamis.blogspot.com/2012/02/faktor-penyebab-kecelakaan-lalu-lintas.html>, Diunduh pada tanggal, 1 Mei 2012.

Kusumaatmadja, Mochtar, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni.

Marpaung, Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 29

Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta ; PT Rineka Cipta.

Sahetapy, J.E, 1995, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamuji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif (Secara Singkat)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS.

Peraturan perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan